

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta
- Bina Pelayanan Kefarmasian, 2011, *Modul Penggunaan Obat Rasional*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Raja Grafindo, Depok
- Direktorat Gratifikasi Kedeputian Bidang Pencegahan KPK, 2017, *Kajian Implementasi Pasal Gratifikasi Dalam Putusan Pengadilan (Edisi Revisi)*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hanafiah, M. Jusuf, dan Amri Amir, 2014, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta.
- Hatta, Mohammad, 2009, *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015, *Pengantar Gratifikasi*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pengenalan Gratifikasi*. Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rosikah, Chatrina Darul dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sahir, Syafrida Hafni, 2021, *Metodologi Penelitian*, Karya Bakti Makmur Indonesia, Yogyakarta.
- Sari, Mila, *et. al.*, 2022, *Metodologi Penelitian*, Global Eksekutif Teknologi, Padang.

Artikel Jurnal

- Adawiyah, Putri Robiatul dan Fenti Yunita, "Corruption Watch Policy and The Risks of Increased Corruption During the Pandemic", *International Social*

Sciences and Humanities UM Jember Proceeding Series, Vol. 1, No. 1, 2022.

Abdillah, Junaidi, *et al.*, “Pembentukan Aparatur yang Bersih dan Berwibawa dengan Pemberian Sanksi Adminitrasi Disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, Vol. 20, No. 3, September 2022.

Anggara, Welly, *et al.*, “Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Gratifikasi dalam Hubungan Dokter dan Perusahaan Farmasi”, *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Gultom, Romi Pardamean, *et al.*, “Gratifikasi oleh Perusahaan Farmasi Terhadap Dokter dalam Pelayanan Medis di Rumah Sakit”, *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 3, No. 2, Juni 2022.

Handayani, Trini, “Tinjauan Medikolegal terhadap Perbuatan Gratifikasi *Sponsorship* oleh Perusahaan Farmasi”, *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, Vol. 1, No. 2, April 2021.

Huda, Samsul, “Criminalization of Gratification as a Corruption Offence”, *Jurnal Multidisiplin Madani (Mudima)*, Vol. 2, No. 12, Desember 2022.

Muwahid, “Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif”, Vol. 7, No. 1, Juni 2017.

Nurliza, Vira, *et al.*, “Tanda Terimakasih yang Dapat Berujung Tindak Pidana Korupsi Jenis Gratifikasi”, Vol. 9, No. 2, September 2023.

Priambodo, Erwanda Rifqi, *et al.*, “Mengapa Korupsi Sulit Diberantas”, *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, Vol. 1, No. 1, September 2020.

Suprabowo dan Bunyamin Alamsyah, “Tinjauan Yuridis tentang Gratifikasi sebagai salah Salah Satu Delik Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 2, Desember 2018.

Susanto, Sri Nur Hari, “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, Maret 2019, hlm. 137.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Juniarti, Dewi Bella, 2022, *Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Damar Wangsid Pradana, 2023, *Upaya Pencegahan Gratifikasi Bagi Pelayanan Publik Di Kejaksaan Negeri Bontang*. Skripsi, Program Sarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

R, Mardia Yuliartati, 2019, *Pengendalian Gratifikasi di PT ASABRI (PERSERO)*, Tesis, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Gratifikasi”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gratifikasi>.

Berita Satu, “Dokter Swasta Penerima Gratifikasi Sulit Dijerat UU Tipikor”, <https://www.beritasatu.com/news/347623/dokter-swasta-penerima-gratifikasi-sulit-dijerat-uu-tipikor>.

Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, “Apakah Dokter Butuh Sponsorship Farmasi?”, <https://dinkes.jogjapro.go.id/berita/detail/bpjs-opini-dlp-rm-rs-pendidikan-dokter-farmasi-apakah-dokter-butuh-sponsorship-farmasi>.

Jaringan Pencegahan Korupsi, “Survei Penilaian Integritas”, <https://jaga.id/jendela-pencegahan/spi?vnk=c396dd7e>.

Jaringan Pencegahan Korupsi, “Gratifikasi”, <https://jaga.id/jendela-pencegahan/gratifikasi?vnk=5f263a0e>.

Julianto, Irwan, “Obat Rasional, Kuncinya Dokter”, <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2024/03/21/obat-rasional-kuncinya-dokter>.

Kementerian Kesehatan RI Inspektorat Jenderal, “Bimbingan Teknis Penyuluh Antikorupsi Tahun 2023”, <https://itjen.kemkes.go.id/berita/detail/bimbingan-teknis-penyuluh-antikorupsi-tahun-2023#:~:text=Penyuluh%20Antikorupsi%20memiliki%20peran%20strategis,manfaat%20langsung%20para%20pemangku%20kepentingan>.

Koran Tempo, “KPK Kaji Aturan Gratifikasi Dokter Swasta”, <https://koran.tempo.co/read/nasional/387143/kpk-kaji-aturan-gratifikasi-dokter-swasta>.

Tempo, “Eksklusif: Suap Obat, KPK: Itu Gratifikasi, Jika...” <https://nasional.tempo.co/read/715783/eksklusif-suap-obat-kpk-itu-gratifikasi-jika>.

Tempo, “Kalbe Farma diduga Beri Uang Pelicin untuk Dokter”,
<https://nasional.tempo.co/read/1270677/kalbe-farma-diduga-beri-uang-pelicin-untuk-dokter>.

Peraturan Perundang-undangan

Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.02.02/Menkes/208/2016 tentang Tim Pengendalian Gratifikasi
Kementerian Kesehatan

Pedoman Organisasi dan Tata Laksana Majelis Kode Etik Kedokteran.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Sponsorship bagi
Tenaga Kesehatan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya
Keluaran Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian
Kesehatan.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan
Gratifikasi

Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/66/2017 tentang Mekanisme Pelaporan
Sponsorship Sesuai Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun
2016 Tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2024.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Materi Perkuliahan

Supriyadi, “Ruang Lingkup Politik Kriminal”, Universitas Gadjah Mada, 2022.

Wawancara

Wawancara dengan Narasumber Chrisna Adhitama, Analis Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Direktorat Jenderal Gratifikasi dan Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi, 13 Februari 2024.

Wawancara dengan Responden Danny, Auditor Ahli Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, 27 Februari 2024.

Wawancara dengan Responden Iyan Tri Pangaloan, Ahli Muda Perancang Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal Direktorat Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, 23 Februari 2024.

Wawancara dengan Responden Kanser Arif Ardiyanto, Auditor Muda Inspektorat Investigasi Kementerian Kesehatan, 27 Februari 2024.

Wawancara dengan Responden Liliani Fora, Auditor Ahli Pertama Inspektorat I Kementerian Kesehatan, 27 Februari 2024.

Wawancara dengan Narasumber Nailul Dina Afera, Analis Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Direktorat Jenderal Gratifikasi dan Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi, 13 Februari 2024.

Wawancara dengan Responden Suryati Oka Citra, Arsiparis Ahli Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, 27 Februari 2024.